



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HAMRIS DARWIS**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **462778**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.160.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/75 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , WARISAN Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 240.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2015, WARISAN Rp. 235.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAHABA EXRIDE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 219.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 4.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.623.000.000**

III. HUTANG **Rp. 205.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.418.000.000**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIANUS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 197910

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/165 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 336.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, ZUSUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 156.224.538

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 867.224.538

III. HUTANG Rp. 638.876.463

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 228.348.075

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 415115

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/204 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 112.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS AVANSA VELOS 1.5 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.582.341

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.847.082.341

III. HUTANG Rp. 150.551.021

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.696.531.320

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIEF FADILLAH AMIER
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 426259

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **340.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **253.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SPORTY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V RM3 2 WD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **58.250.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **22.111.573**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **673.361.573**

III. HUTANG **Rp.** **407.176.780**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **266.184.793**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAERUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 718671

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 315.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/77 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI / LX150 C (KLX 150S) SPEDA MOTOR SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2 PD JUPITER Z Tahun 2007, HIBAH TANPA AKTA Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.652.088

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 473.152.088

III. HUTANG Rp. 300.565.059

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 172.587.029

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.